

BAB II

KONDISI NAHDLATUL ULAMA (NU) TAHUN 1945

A. NU menjelang Kemerdekaan tahun 1945

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada 31 Januari 1926 sebagai gerakan sosial keagamaan. Didirikannya NU tahun 1945 itu untuk menjawab dua tantangan yang saat itu sedang terjadi. Tantangan itu disebut globalisasi yang terjadi dalam dua hal: *Pertama*, globalisasi Wahhabi, ketika Arab Saudi dikuasi oleh kelompok Wahhabi dan dunia Islam banyak yang mengimpor gagasan-gagasan Wahhabi tersebut dalam bentuk pemurnian Islam, termasuk ke Indonesia. *Kedua*, globalisasi Imperialisme fisik konvensional yang di Indonesia dilakukan oleh Belanda, Jepang, dan Inggris.¹

Organisasi NU yang dimotori oleh para kyai-kyai pesantren ini didirikan tidak hanya dilatarbelakangi oleh adanya gerakan kelompok pemurni Islam saja, akan tetapi juga dilandasi dengan rasa nasionalisme yang kuat atas tanah airnya supaya terbebas dari belenggu penjajahan yang saat itu dialami Indonesia.

Ali Haidar dalam bukunya NU dan Islam di Indonesia mengemukakan bahwa ada empat motif yang melatarbelakangi pembentukan Nahdlatul

¹NurKhalikRidwan, *NU dan Bangsa 1914-2010, Pergulatan Politik dan Kekuasaan* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2010)p.45.

Ulama. Motif utama yang mendasari gerakan para ulama pesantren membentuk NU ialah motif agama sebagai *jihad fi sabilillah*. Motif kedua adalah tanggung jawab pengembangan pemikiran keagamaan yang ditandai dengan pelestarian ajaran madzhab *ahlussunnah wal jama'ah*. Motif ketiga dorongan untuk mengembangkan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, sosial dan ekonomi. Motif ini ditandai dengan pembentukan *Nahdlatul Wathan, Nahdlatul Afkar, dan Ta'mirul Masjid*. Motif keempat adalah politik yang ditandai dengan semangat nasionalisme ketika pendiri NU mendirikan cabang SI di Mekkah dan obsesi mengenai masa depan negeri merdeka bagi umat Islam.²

Motif nasionalisme timbul karena NU lahir dengan niatan kuat untuk menyatukan para ulama dan tokoh-tokoh agama dalam melawan penjajahan. Semangat nasionalisme itu pun terlihat juga dari nama Nahdlatul Ulama itu sendiri yakni “Kebangkitan Para Ulama”. NU pimpinan Hadhratus Syaikh KH. Hasyim Asy'ari sangat nasionalis. Sebelum RI merdeka, para pemuda di berbagai daerah mendirikan organisasi bersifat kedaerahan, seperti Jong Cilebes, Pemuda Betawi, Jong Java, Jong Ambon, Jong Sumatera, dan sebagainya, akan tetapi kiai-kiai NU justru mendirikan organisasi yang bersifat nasionalis.³

Pada tahun 1937, disaat sebuah organisasi Islam yang bersatu dalam sebuah konfederasi, yakni MIAI (*Majlis Islam A'laa Indonesia*), Nahdlatul Ulama

²M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia, pendekatan fiqih dalam politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), p.315-316.

³ Amir Farih, “Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, *Walisongo: Jurnal Penelitian sosial keagamaan*, Vol. 24, No. 2(November 2016), p.252.

(NU) ikut serta didalamnya, bagi NU, keterlibatannya dalam MIAI merupakan langkah pertama menuju dunia politik dalam arti terbawa untuk menentukan posisi secara tegas terhadap penjajahan Belanda menjelang perang dunia II.⁴

Lewat para aktivis mudanya seperti KH. Mahfudz Shiddiq dan KH. Wahid Hasyim, putra KH. Hasyim Asy'ari, NU semakin terlibat dalam perjuangan nasional. Ketika pada tahun 1939 partai-partai politik membentuk sebuah federasi yang diberi nama GAPI (Gabungan Politik Indonesia), para aktivis muda ini terbawa ke panggung politik sebagai wakil NU di MIAI yang mendukung seruan GAPI agar Indonesia berparlemen. Selain itu, MIAI melarang pemuda Indonesia ikut serta dalam pertahanan rakyat yang diorganisir Belanda atau mendonorkan darahnya bagi tentara kolonial. Keterlibatan NU secara penuh dalam pertempuran anti-kolonial dimulai sesudah pendudukan Jepang.⁵

Pendudukan Jepang yang dimulai bulan Februari 1942 sangat menentukan kehidupan NU. NU pada mulanya menerima Jepang dengan penuh harapan, terutama mengenai janji kemerdekaan bagi negara-negara yang akan didudukinya. Namun kesewenag-wenangan Jepang, terutama pemaksaan penghormatan terhadap kaisar Jepang dengan cara membungkukan badan kearahnya menyulut reaksi penolakan dari para kyai, antara lain Kyai Hasyim Asy'ari yang akhirnya KH. Hasyim Asy'ari dijebloskan ke penjara selama beberapa bulan pada tahun 1942 akibat tidak mau melakukan hal ini.

⁴Andree Feillard, *NU vis-a-vis negara: pencarian Isi, bentuk dan Makna*, (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013), p.16.

⁵Feillard, *NU vis-a-vis negara...*, p.17.

Setelah beberapa bulan, Jepang akhirnya menyadari bahwa dalam aspek akidah, Islam tradisional tidak mengenal sikap tawar menawar dan penangkapan tokoh Islam itu juga dirasa akan merugikan Jepang sendiri. Untuk itu pemerintah militer Jepang akhirnya membebaskan KH. Hasyim Asy'ari dari penjara Bubutan, Surabaya. Pembebasan itu ditempuh Jepang, karena menyadari adanya potensi Islam tradisional/NU yang merupakan mayoritas masyarakat Islam di Jawa, mereka tidak ingin kehilangan dukungan dari kalangan Islam terbesar itu.⁶ Permintaan maaf yang ditunjukkan kepada masyarakat muslim dan juga pemberian status yang terhormat kepada para ulama sebagai perantara yang istimewa dengan rakyat akhirnya mendorong NU untuk bekerja sama dengan Jepang.

Pada tahun 1943 MIAI dibubarkan dan diganti dengan Masyumi (*Majlis Syuro Muslimin Indonesia*) yang menyatakan siap membantu kepentingan Jepang. Hanya Muhammadiyah dan NU saja yang diakui secara sah oleh penjajah dan yang diperbolehkan menjadi Masyumi. Pada tahun 1944, Kyai Hasyim Asy'ari diangkat sebagai ketua *Shumubu*, Kantor Urusan Agama buatan Jepang, NU mulai masuk kedalam pemerintahan untuk pertama kalinya. Pada tahun itu juga, KH. Wahid Hasyim, putera KH. Hasyim Asy'ari berhasil membujuk Jepang untuk memberikan latihan militer khusus bagi para santri dan mengizinkan mereka membentuk barisan pertahanan rakyat sendiri.⁷

⁶ZainulMilalBizawie, *Laskar Ulama-Santridan Resolusi Jihad, Garda depan menegakkan Indonesia (1945-1949)* (Tangerang; Pustaka Compass, 2014), p.129.

⁷Feillard, *NU vis-a-vis negara...*, p.26.

Kesatuan khusus Islam itu dinamakan Hizbullah atau “tentara Allah”, yang dalam Istilah Jepang bernama *Kaikyo Seinen Teishintai*, dengan format sebagai korps cadangan untuk kesatuan PETA (Pembela Tanah Air) dalam upaya pembelaan tanah air. Sementara secara ideologis Hizbullah ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi perintah agama, menginsyafkan umat serta berusaha meningkatkan upaya untuk berjuang bersama pasukan Jepang dengan semboyan “Luhur bersama-sama dan lebur bersama-sama di Jalan Allah untuk menghancurkan musuh yang zalim yaitu Amerika Serikat dan Belanda”.⁸

Para kiyai yang tercatat sebagai perwira PETA mendapatkan tugas untuk melatih dasar-dasar latihan dan kemampuan militer terhadap para anggota Hizbullah. Hizbullah ini berdiri pada 14 Oktober 1944 dan keberadaanya sekaligus memberikan peluang bagi kalangan Islam untuk mengatur langkah dalam mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Jepang Semakin terjepit ketika Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang, sehingga perjanjian untuk tidak saling menyerang antara Jepang-Uni Soviet yang disepakati sebelum meletusnya perang dunia II sudah tidak berlaku lagi. Dalam situasi ini kedudukan Jepang di Indonesia seperti Ambon, Makassar, Manado dan juga Surabaya mulai mendapatkan serangan udara dari sekutu.

⁸Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.139.

Bahkan sekutu juga telah mendaratkan pasukannya di kawasan kaya minyak bumi, Tarakan dan Balikpapan Kalimantan.⁹

Bagi masyarakat Islam di Indonesia, situasi ini membuat mereka semakin mengobarkan semangat dan perasaan anti Jepang. Sikap Jepang yang meluluskan keinginan kalangan Islam yang diberikan terlambat itu tidak sepenuhnya membuat mereka mengikuti apa yang menjadi keinginan Jepang. Sikap keras Jepang terhadap pergolakan-pergolakan sosial yang muncul seperti di tasik Malaya, Blitar, dan beberapa daerah lain menjadi pemicu atas lahirnya perasaan benci kepada Jepang.¹⁰

Menyikapi situasi ini, KH. Wahid Hasyim secara intents mengadakan kontak dengan kalangan nasionalis untuk bersama mendesakkan kepada Jepang agar segera merealisasikan janji kemerdekaan. Desakan itu membuahkan hasil dengan terbentuknya *Dokuritsu Jumbi Coosakai* atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945, yang diumumkan oleh *Saiko Shikikan* Letjen Kumakichi Harada. Pembentukan badan ini merupakan langkah pertama Jepang untuk merealisasikan apa yang menjadi janji PM Koiso mengenai pemberian kemerdekaan kepada Indonesia.¹¹ Keberadaan BPUPKI ditunjukkan untuk mempelajari dan menyelidiki segala sesuatu yang terkait dengan pembentukan negara Indonesia yang merdeka.

⁹ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia VI* (Jakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan dan PT. Balai Pustaka), p.67.

¹⁰ Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.157.

¹¹ Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.157.

Susunan dari BPUPKI ini terdiri atas sebuah badan perundingan dan kantor tata usaha, yaitu badan perundingan yang terdiri dari ketua (*Kaico*), dan dua wakil ketua (*fuku kaico*), dan 60 orang anggota (*iin*). Dari seluruh jumlah anggota BPUPKI itu sebagian anggotanya adalah anggota *Chuo Sangi-In*.¹²Keanggotaan BPUPKI mewakili sebagian besar pemimpin setengah baya di Jawa yang masih hidup yang berasal dari semua aliran pemikiran yang penting. Radjiman Wediodiningrat menduduki jabatan ketua, sedangkan tokoh lain seperti Soekarno, Hatta, Mansur, Dewantara, Salim, Ki Bagus Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, Mohammad Yamin dan lain-lain sebagai anggotanya.¹³

BPUPKI secara resmi didirikan pada 29 Mei 1945, Yang dipilih sebagai ketua yaitu Radjiman, seorang yang bukan berasal dari kalangan Islam atau nasionalis akan tetapi dari kalangan elit-priyai. Kalangan Nasionalis melalui Soekarno menyetujui penempatan Radjiman sebagai ketua, Soekarno dengan statusnya sebagai anggota beranggapan bahwa dirinya memungkinkan untuk mengikuti secara intensif berbagai pembicaraan yang diselenggarakan dalam internal BPUPKI dan juga forum-forum yang lain.

Dari kelompok Islam, dalam struktur BPUPKI terdapat 15 orang untuk duduk sebagai anggota. Jumlah ini dianggap tidak seimbang dengan populasi

¹²Ahmad Mansur Suryanegara, *ApiSejarah 2* (Bandung: SalamadaniPustakaSemesta, 2010), p. 124.

¹³M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), p.313.

penduduk muslim yang mayoritas saat itu, bahkan dalam kalangan islam dari Pesantren (NU) hanya menempatkan satu orang saja yaitu KH. Wahid Hasyim.¹⁴

Perwakilan Islam yang menjadi anggota BPUPKI adalah, KH. Wahid hasyim dari NU, Abikusno Tjokrosuyoso dari PSII, KH. Ahmad Sanusi, R. Samsudin dari PUI Sukabumi, KH. Abdul Halim dari PUI Majalengka, Ki Bagus Hadikusumo, KH. Mas Mansur, A. Kahar Muzakkir dari Muhammadiyah, RR Wongsokusumo dari Maysumi, KH. Agus Salim dari Penyedat, Sukiman wiryosandjoyo dari PII, Ny, Sunario mangunpuspito dari Aisyiyah, Abdul Rahman Baswedan dari Partai Arab Indonesia, dan Abdul Rahim Pratalikrama.¹⁵

Masalah-masalah pokok yang dibahas dalam BPUPKI ini adalah tentang persoalan negara, batas negara, dasar filsafat negara, dan hal-hal yang berhubungan dengan pembuatan suatu konstitusi. yang menjadi perdebatan sengit saat itu adalah masalah dasar negara. Kelompok Islam dalam BPUPKI ingin menggunakan dasar Islam sebagai dasar agama sedangkan kelompok nasionalis sekuler menganggap bahwa agama merupakan urusan pribadi seseorang dan tidak ada hubungannya dengan politik.¹⁶

Sidang pertama BPUPKI diselenggarakan selama tiga hari, 29 Mei-1 Juni 1945 dengan mengajukan tiga pembicara; Mr. Mohammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Mereka berbicara untuk mengungkapkan pemikiran

¹⁴Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.158.

¹⁵Suryanegara, *ApiSejarah 2...*, p.126.

¹⁶Nor Huda, *Islam Nusantara, Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), p.121.

dan pandangan mereka tentang sebuah dasar Ideologi negara yang hendak diterapkan pada negara Indonesia.

Pidato pertama di sampaikan oleh Mohammad Yamin, ia mengemukakan lima azas dasar dari Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Yaitu; Peri kebangsaan, peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, peri kerakyatan dan kesejahteraan rakyat. Pidato kedua disampaikan Prof. Supomo yang merupakan seorang ahli hukum mengajukan pemikirannya tentang dasar-dasar negara yaaitu; persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat.¹⁷

Soekarno mendapatkan giliran untuk berpidato pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menguraikan tentang dasar negara dan juga memberikan nama untuk dasar negara yang diuraikannya itu dengan istilah “pancasila” karena terdapat lima prinsip dalam pemikiran dan uraiannya itu. Istilah Pancasila itu diungkapkannya bersumber dari inspirasi pada unsur-unsur yang tidak terpisahkan dalam keyakinan dan budaya bangsa Indonesia. Kelima dasar negara yang disampaikan Soekarno yang disebutnya sebagai Pancasila itu adalah; Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, kesejahteraan Sosial dan ketuhanan yang maha Esa.¹⁸

Setelah sidang pertama dilaksanakan, BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil dibawah pimpinan Soekarno dengan anggotanya yaitu Mohammad Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, KH. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto

¹⁷Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.159-160.

¹⁸Notosusanto, *Sejarah nasional Indonesia VI...*, p.70.

Iskandar Dinata, Mr. Muhammad Yamin dan AA. Maramis. Susunan kepanitiaan ini dimaksudkan untuk menampung saran, usul serta konsep dari para anggota yang nantinya akan diserahkan ke sekretariat BPUPKI. Didalam susunan panitia kecil ini ada dua tokoh muslim yang mewakili Islam, yaitu KH. Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah.

Setelah sidang pertama 1 Juni 1945 dan masa reses usai, BPUPKI memulai lagi sidang kedua pada 10 Juli 1945. Soekarno pada saat itu melaporkan bahwa ia dan anggota yang lain pada 22 Juni telah mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang dalam pertemuan itu disepakati terbentuknya sebuah panitia lagi yang dinamakan “panitia sembilan” yang terdiri dari Soekarno, Mohammad Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Subardjo, AA. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, KH. Wahid Hasyim, H. Agus Salim dan Abikusumo Sokrosuyoso.¹⁹ Pada kepanitiaan baru ini perwakilan dari Islam bertambah lagi menjadi empat orang, meski dalam keanggotaan panitia sembilan tersebut nama Ki Agus Hadikusumo tidak ada, akan tetapi KH. Wahid Hasyim sebagai perwakilan dari NU tetap dipertahankan dan menjadi bagian dari keanggotaan panitia sembilan.

Dari serangkaian diskusi dan pertemuan panitia sembilan pada tanggal 22 Juni 1945 itu dihasilkan rumusan yang menggambarkan maksud dan tujuan dari pembentukan negara Indonesia dalam sebuah *preamble* atau Mukaddimah yang

¹⁹Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.161.

dinamakan “Piagam Jakarta” (*Jakarta Charter*). Rumusan kolektif dari dasar negara Indonesia yang merdeka itu adalah:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁰

Pada 11 Juli 1945, panitia perancang mencapai kesepakatan dengan menyetujui isi *preamble* Piagam Jakarta.²¹ Selanjutnya pada 12 Juli, Soekarno selaku panitia perancang UUD melaporkan kepada pimpinan BPUPKI tentang hasil kerja kepanitiaan, yakni; 1) pernyataan kemerdekaan Indonesia, 2) pembukaan Undang-undang, dan 3) Undang-undang dasar sendiri (batang tubuh).

Sebelum konsep Piagam Jakarta itu disahkan pada sidang tanggal 12 Juli, terdapat suatu masalah. Masalah itu bermula ketika muncul aspirasi dari kelompok non-Muslim dari Indonesia Timur kepada Mohammad Hatta yang

²⁰Notosusanto, *Sejarah nasional Indonesia VI...*, p.71.

²¹Selain panitia sembilan, ada pula sebuah panitia kecil yang dibentuk untuk bertugas membuat rancangan UUD. Panitia ini diketuai oleh Prof. Supomo dibantu Mr. Wongsonegoro, Mr. Ahmad subardjo, AA. Maramis, Mr. Singgih, H. Agus Salim, dan Mr. Sukiman dengan tugas merancang konstitusi sekaligus menyusunn kembali rancangan UUD yang telah dibahas dalam kepanitiaan.

menyatakan, agar sebelum UUD itu disepakati sebaiknya dilakukan perubahan terhadap diktum pertama Piagam Jakarta. Mereka menghendaki kalimat “ketuhanan, dengan menjalankan Syari’at Islam bagi para pemeluknya” dihapus dan diganti dengan kalimat “ketuhanan yang maha esa”.²²

AA. Maramis yang mewakili golongan non-Muslim Indonesia timur yang juga merupakan anggota BPUPKI ini sebelumnya menyetujui diktum pertama pada Piagam Jakarta yang menyatakan “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, ia mengungkapkan baginya diktum tersebut tidak ada masalah bagi golongan kristen atau kelompok minoritas non-Islam lainnya karena jelas ditegaskan kewajiban menjalankan syari’at Islam itu hanya bagi pemeluk Islam saja, sementara bagi pemeluk non-Islam tidak diwajibkan untuk hal itu. Namun sikap kelompok non-Muslim berubah ketika salah satu perwakilan Islam, Ki bagus Hadikusumo dan KH. Ahmad Sanusi meminta kalimat “ke-Tuhanan, dengan kewajiabn menjalankan Syari’at Islam bagi para pemeluknya” di sederhanakan menjadi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam” saja. Usulan ini yang kemudian memicu reaksi dari kalangan non-Muslim.²³

Tujuh kata pada butir pertama Piagam Jakarta itu ialah hasil dari pemikiran KH. Wahid Hasyim. Dengan melihat kenyataan bahwa Islam adalah keyakinan

²²Notosusanto, *Sejarah nasional Indonesia VI...*, p.73.

²³Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.162.

mayoritas yang dipeluk oleh masyarakat Indonesia serta keunggulan dan kelengkapan ajaran Islam dibandingkan dengan agama-agama lain. Jika dicermati, kalimat yang menjadi perdebatan itu merupakan kalimat yang mengungkapkan realitas masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, kalimat itu juga bisa ditafsirkan sebagai bentuk “diskriminasi” terhadap agama-agama non-Islam yang menjadi minoritas di Indonesia.

KH. Wahid Hasyim membantah persepsi yang menyatakan bahwa kalimat pertama pada Piagam Jakarta itu memiliki potensi munculnya rasa fanatisme dan seolah-olah syari’at Islam harus dipaksakan untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kalangan non-Islam. Bagi dirinya tidak ada paksaan terhadap disetujuinya kalimat tersebut oleh para anggota BPUPKI yang lain termasuk dari anggota non-Muslim.

Meski mendapat penolakan dari berbagai kalangan, KH. Wahid Hasyim tetap berusaha meyakinkan gagasan tersebut. Ia menyatakan dengan kalimat pada diktum pertama Piagam Jakarta tersebut bukan berarti pemeluk agama lain tidak memiliki kebebasan dalam menafsirkannya menurut agama masing-masing. Dalam al-Qur’an pun umat Islam dilarang memaksa seseorang untuk ikut kedalam keyakinannya.²⁴

Dalam perkembangannya, KH. Wahid Hasyim melihat ide dan gagasannya mengenai negara Islam terlalu berisiko untuk dipaksakan, dikarenakan golongan non-muslim dan juga Nasionalis dengan gigih menyatakan keberatannya. Posisi

²⁴Bizawie, *Laskar Ualam-Santri...*, p.165.

KH. Wahid Hasyim dalam hal ini sangat vital karena ia merupakan sosok yang berpengaruh dari kalangan Islam.²⁵

Perdebatan tentang bentuk negara ini sangat menguras waktu dan pikiran, hingga akhirnya Pemerintah militer Jepang membubarkan BPUPKI untuk kemudian menggantinya dengan *dokuritzu Junbi Inkai* atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945.²⁶ KH. Wahid Hasyim sebagai perwakilan dari NU dan juga Soekarno yang melihat potensi perpecahan itu begitu intens bertemu dan berupaya untuk mencari titik temu.

Dengan dilakukannya konsultasi dengan anggota PPKI dari golongan Islam seperti Kasman Singodimejo, Mr. Teuku Moh. Hassan, dan Ki Bagus Hadikusumo didapatkan kesepakatan untuk mengubah azaz pertama pada Piagam Jakarta yang dinilai lebih memenuhi kepentingan semua pihak dengan memunculkan kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai pengganti kalimat “Ketuhanan, Dengan Kewajiban Syari’at Islam bagi Para Pemeluknya. Atau juga kalimat usulan dari Ki Bagus hadikusumo dan KH. Sanusi, ‘Ketuhanan Dengan Kewajiban menjalankan Syari’at Islam’”.²⁷

Dengan tercapainya kompromi dan kesepakatan itu maka potensi perpecahan yang mengancam persatuan bangsa dalam menyongsong kemerdekaan dapat diselesaikan dan diterima semua pihak. Peran KH. Wahid Hasyim sebagai

²⁵ Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.166.

²⁶ Ridwan, *NU dan Bangsa...*, p.71.

²⁷ Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.167.

perwakilan dari NU tidak dapat dipisahkan dalam kompromi ini. Kebesaran Jiwa dan sikap kenegarawannya dengan mementingkan persatuan dan kesatuan daripada sekedar mempertahankan kepentingan satu kelompok mendapat penghargaan dari Soekarno sebagai kalangan Nasionalis.²⁸

Menurut KH. Wahid Hasyim, bahwa toleransi yang dilakukan oleh NU dan tokoh-tokoh pejuang Muslim lain yang menerima untuk menghapus “tujuh kata” dan menerima tuntutan kaum Kristen Indonesia Timur, itu semua merupakan pengorbanan dan perjuangan para ulama NU demi terpeliharanya kemerdekaan dan juga demi persatuan dan kesatuan NKRI.²⁹

B. NU pada masa proklamasi kemerdekaan tahun 1945

Pada pertengahan tahun 1945 perang dunia II hampir selesai dengan kemenangan kelompok poros (AS, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dll). Pada tanggal 6 Agustus bom Atom pertama di jatuhkan di Hiroshima yang menewaskan sedikitnya 78.000 orang. Uni soviet mengumumkan perang terhadap jepang pada tanggal 8 agustus 1945. Yang kemudian terjadi bom atom kedua yang dijatuhkan di nagasaki dan pihak Uni Soviet menyerbu Manchuria. melihat situasi jepang yang sulit, soekarno, Hatta dan Radjiman mendatangi Panglima tertinggi wilayah

²⁸ Suryanegara, *Api Sejarah 2...*, p.133.

²⁹ Amir Farid, “Nahdlatul Ulama (NU) dan Kontribusinya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”, *Walisongo: Jurnal Penelitian sosial keagamaan*, Vol. 24, No. 2(November 2016), p.269.

Selatan Terauchi Hisaichi di Saigon. Dan Terauchi menjanjikan kemerdekaan bagi seluruh bekas wilayah hindia belanda.³⁰

Pada 9 agustus 1945, Soekarno sebagai ketua PPKI, Mohammad Hatta dan Juga Radjiman Wedyodiningrat dipanggil oleh panglima tentara Selatan, Marsekal (darat) Terauchi hisaichi, ke Dallat-Vietnam untuk membicarakan tentang kemerdekaan Indonesia.³¹

Sebelum menemui markeal Terauchi, Soekarno sebelumnya telah mengadakan konsultasi dengan beberapa pemuka agama Islam diantaranya adalah KH. Hasyim Asy'ari di Jombang mengenai kemungkinan hari atau tanggal diumumkannya kemerdekaan serta jaminan dari kalangan Islam Tradisional (NU) jika proklamasi jadi diumumkan. KH. Hasyim asy'ari memberikan Jaminan bahwa pihaknya telah menghubungi Angkatan Laut Jepang di Surabaya dan mereka setuju jika Soekarno nantinya yang akan dijadikan sebagai pemimpin negara bila kemerdekaan diumumkan.³²Jaminan dari KH. Hasyim Asy'ri merupakan penegasan bahwa Nahdltul Ulama (NU) akan berdiri di belakang proklamasi dan akan membela apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggagalkan dan menentangnya. Hal ini juga merupakan sikap dari para golongan Islam Tradisional (NU) yang setuju dan berharap agar proklamasi kemerdekaan segera di umumkan.

Keterlibatan NU dalam rangka menyongsong kemerdekaan sangat diperhitungkan oleh tokoh nasionalis seperti Soekarno, mengingat NU sejak awal

³⁰Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...*, p.315.

³¹Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.168.

³²Suryanegara, *Api Sejarah 2...*, p.144.

sudah bergerak dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hal ini juga yang menegaskan bahwa NU sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan pada waktu itu sangat cinta kepada tanah air dan bangsanya.

Tiga hari sebelumnya, tanggal 6 Agustus 1945, kota pelabuhan Jepang, Hiroshima, dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat, dan tepat pada hari ketika Soekarno, Hatta, dan Radjiman berangkat ke Dalat. Tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat Jepang semakin luluh lantak. Meski begiut, Jepang tetap belum menyatakan sikap untuk menyerah secara resmi. Pernyataan menyerah tanpa syarat Jepang terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 dan diumumkan secara resmi pada keesokan harinya.³³

Pada tanggal 15 Agustus Jepang menyerah tanpa syarat. Setelah menyerahnya Jepang Indonesia mengalami kekosongan politik atau kekuasaan (*vacuum of power*). Hal ini terjadi karena Jepang masih tetap berkuasa meski sudah menyerah, juga tidak adanya pasukan sekutu yang akan menggantikan kekuasaan mereka. Pihak Jepang masih mempertahankan keadaan politik yang ada sampai kedatangan pasukan sekutu.³⁴

Semula rakyat Indonesia menganggap kepergian Soekarno dan Hatta terkait dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, namun hingga mereka kembali pada 12 Agustus 1945, tidak ada tanda atau informasi tentang janji kemerdekaan dalam waktu dekat. Pada situasi ini, ada perbedaan pandangan antara kelompok

³³Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.169.

³⁴Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...*, p.315.

tua yakni Soekarno dan kelompok muda. Golongan muda menginginkan agar kemerdekaan segera diumumkan dan mendesak Soekarno dan Hatta untuk menyatakan kemerdekaan karena Jepang telah mengalami kekalahan. Namun Soekarno dan Hatta bersikap menunggu pernyataan Jepang untuk mengumumkan kemerdekaan tersebut.

Golongan muda kemudian membawa Soekarno dan Hatta ke Rengasdengklok, Karawang dengan dalih melindungi dan menjauhkan mereka dari tekanan pihak Jepang. Dalam perjalanannya ternyata tidak ada pemberontakan yang dilakukan oleh Jepang dan Pihak Jepang menginginkan agar Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan mengatur kemerdekaan.³⁵

Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta setelah kalangan politisi Jakarta mengutus Ahmad Subardjo untuk menyusul mereka berdua. Setelah itu para tokoh politik dan perwakilan pemuda berkumpul untuk membicarakan kemerdekaan di rumah seorang perwira penghubung Angkatan Laut Jepang, Laksamana Muda Maeda, di jalan Imam Bonjol no.1 Menteng, rapat menyepakati untuk segera mengumumkan kemerdekaan pada esok hari. Pada tanggal 17 Agustus 1945 naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia akhirnya diumumkan pada pukul 10.00 di rumah Soekarno yang terletak di Pegangsaan Timur no.56.³⁶

³⁵Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern...*, p.316.

³⁶Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.170.

Naskah proklamasi kemerdekaan itu berbunyi:

Proklamasi:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan, dll. Deselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 17-08-1945

Atas nama bangsa Indonesia,
(tertanda) Sukarno Hatta

Para pemuda revolusioner menyebarkan berita proklamasi ke seantero Jakarta sehingga pada hari itu penduduk Jakarta telah mengetahui telah diumumkannya kemerdekaan. Pihak Jepang juga telah mengetahui informasi proklamasi kemerdekaan Indonesia ini, namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan berusaha mencegah agar berita tentang kemerdekaan itu tidak menyebar. Akan tetapi kaum pemuda telah menyebarkan selebaran-selebaran itu tentang kemerdekaan Indonesia melalui media transportasi umum seperti term dalam kota, kereta api, dan kendaraan lainnya. Selain itu mereka juga menghubungi saudara mereka di kota-kota lain sehingga berita proklamasi 17 Agustus 1945 telah menyebar ke seantero Jawa.³⁷Sementara itu, di kota Surabaya, Jawa Timur, berita tentang proklamasi ini diterima pada tengah hari tanggal 17 Agustus 1945, dan

³⁷Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.170.

menjelang malam hari seluruh penduduk Surabaya telah mengetahui berita proklamasi tersebut.

C. NU Pasca Proklamasi Kemerdekaan

NU adalah sebuah organisasi yang sejak kelahirannya hingga Indonesia merdeka menjadi penjaga keutuhan NKRI. Saat didirikannya NU merupakan *Jam'iyah Diniyyah* (organisasi keagamaan) yang melengkapi organisasi-organisasi kebangsaan dan keagamaan (Islam) yang sudah ada sebelumnya, seperti Budi Utomo dan Serikat Islam. NU sejak kelahirannya bersama-sama dengan organisasi nasional lainnya turut menyokong berdirinya NKRI yang dilakukan sejak masa perebutan kemerdekaan.³⁸

Setelah kemerdekaan di proklamasikan, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) melanjutkan sidangnya pada 18-22 Agustus 1945 dengan tidak lagi meminta persetujuan Jepang. Sidang ini adalah sidang kedua PPKI setelah pelantikannya 7 Agustus di bawah pengawasan Jepang yang dianggap sebagai sidang pertama.³⁹

pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang kemudian berubah nama menjadi *Komite Nasional Indonesia Pusat* (KNIP) menyetujui dan mengeluarkan keputusan-keputusan penting seperti menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang kemudian memilih Ir. Soekarno sebagai Presiden

³⁸Abd. Halim, *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan* (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 2013), p.127.

³⁹Ridwan, *Nu dan bangsa...*, p.75.

dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.⁴⁰ KNIP juga mengeluarkan keputusan mengenai pembentukan komite nasional ditingkat daerah. Kemudian pada 2 September 1945 dibentuk kabinet pemerintah yang menganut asas presidensial. Sebuah kenyataan juga harus diungkapkan meski persyaratan mengenai terbentuknya sebuah negara telah terpenuhi pada tanggal 18 Agustus 1945 serta hari-hari dan bulan setelahnya, namun efektifitas dari pemerintahan masih jauh.

Menyikapi kemerdekaan RI, pihak Jepang segera melakukan tindakan memandulkan segala hal yang memiliki potensi bagi pihak Indonesia untuk berbalik melawan Jepang. Tindakan itu diantaranya dengan menerbitkan keputusan dari pemerintah militer Jepang tentang pembubaran PETA pada 18 Agustus 1945, hal ini dilakukan untuk menghambat Indonesia menjadikan PETA menjadi satuan organisasi tentara negara. Pembubaran itu diikuti dengan perintah untuk menyerahkan senjata yang ada di setiap daerah dan diberikan ke markas tentara Jepang.⁴¹ Dengan keluarnya keputusan ini hampir seluruh senjata PETA telah jatuh ke tangan Jepang, sehingga kesatuan yang diharapkan bisa menempatkan diri sebagai garda pertahanan negara itupun bubar dan kini tidak memiliki struktur komado lagi.

Kesadaran akan ancaman terhadap kemerdekaan mulai terlihat saat lepasnya para tahanan Belanda dari penjara-penjara Jepang serta pendudukan

⁴⁰Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.172.

⁴¹Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.172.

beberapa titik dan tempat oleh para bekas tawanan Jepang. Bekas tawanan Jepang itu sering melontarkan ejekan terhadap kemerdekaan Indonesia, mereka menganggap kemerdekaan Indonesia tidak sah karena bagi mereka setelah Jepang menyerah yang harusnya menguasai Indonesia adalah eks-pemerintahan Belanda yang sebelum Jepang menguasai Indonesia.⁴² Perlakuan bekas tawanan Jepang itu menuai rekasi dari masyarakat Indonesai dan sering terjadi bentrokan. Seperti di Surabaya, ketegangan para arek-arek Surabaya dan bekas tawanan menimbulkan kemarahan rakyat yang berujung pada terjadinya insiden di Hotel Yamato pada 19 September 1945.

Meski Presiden dan wakil Presiden sudah ditetapkan dan kabinet sudah dibentuk, keadaan nasional saat itu masih belum stabil, karena peralihan Jepang ke Sekutu masih terus terjadi. Bahkan dikemudian hari peralihan dari Jepang kepada sekutu itu menimbulkan persoalan sendiri karena Belanda yang sudah tidak menguasai Indonesia kembali lagi dengan membonceng sekutu dan memanfaatkannya untuk kembali menguasai Indonesia.⁴³

Di Jakarta, upaya untuk menghidupkan kembali keadaan seperti masa Hindia-Belanda dilakukan orang-orang Belanda, bahkan telah terbentuk sebuah kesatuan liar yang terdiri dari para bekas anggota KNIL dengan tujuan melindungi orang dan kepentingan Belanda dan mengambil langkah-langkah pertama yang

⁴²Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.172.

⁴³Ridawan, *NU dan Bangsa...*,p.78.

diperlukan untuk segera mengembalikan kekuasaan Kolonial Hindia Belanda terhadap wilayah Jakarta.

Begitupun juga dikota-kota lain di Jawa. Mereka melakukan hal yang sama sebagaimana yang mereka lakukan di Jakarta. Sikap dan tindakan ini menimbulkan berbagai ketegangan bahkan bentrokan antara kaum revolusioner Indonesia dengan Belanda. Seperti di Surabaya, ketegangan arek-arek Surabaya dan eks-tawanan Belanda telah menimbulkan kemarahan masif penduduk Surabaya yang berujung pada meledaknya sebuah insiden di Hotel Yamato pada 19 September 1945.⁴⁴

Situasi ini kemudian terus menuai reaksi dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi Nahdlatul Ulama. NU melalui ketuanya KH. Hasyim Asy'ari pada kemudian hari mengeluarkan fatwa Jihad atau perang melawan para sekutu dan juga Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesai setelah Indonesia menyatakan merdeka. Seruan ini yang kemudian dikenal dengan "Resolusi Jihad", yang menjadi acuan rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pihak-pihak yang ingin kembali menguasai Indonesia.

Munculnya resolusi ini tentunya mempertimbangkan aspek status Indonesia yang memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Maka pada saat status Indonesia sebagai negara yang berdaulat penuh dan kemudian terjadi pendudukan atasnya, apalagi oleh mereka yang beragama non Islam, maka hal ini dianggap sebagai upaya untuk melakukan perbuatan atas hak-hak umat

⁴⁴Bizawie, *Laskar Ulama-Santri...*, p.173.

Islam yang dapat dikhawatirkan dapat mengganggu pelaksanaan dan hak-hak ibadahnya sebagai umat Islam. Maka disinilah kemudian muncul pernyataan Indonesia sebagai *darul harb* yang tentunya harus dilakukan upaya berperangan untuk merebut kembali kemerdekaannya.⁴⁵

NU sebagai organisasi keagamaan menyatakan pada saat Indonesia merdeka dan mendapat gangguan dari musuh, maka Indonesia bisa dikatakan sebagai negara perang (*darul harb*). Pernyataan ini berbeda dengan sikap NU sebelum Indonesia dinyatakan merdeka, yang mana sebelumnya NU menganggap Indonesia pada masa pendudukan Belanda dan Jepang sebagai negara damai (*Darul Islam*). Hal ini bisa terjadi karena NU dalam menyampaikan sebuah pandangan dan menentukan sebuah keputusan selalu melihat pada kondisi dan situasi pada saat peristiwa itu terjadi.

Bagi NU, negara yang sah setelah proklamasi kemerdekaan adalah Indonesia, dan apabila ada pihak-pihak yang ingin menjegal kemerdekaan itu maka wajib diperangi sebagai sebuah perlawanan dan pembelaan. Oleh karenanya pada saat tentara sekutu ingin berusaha menjegal kemerdekaan Indonesia, NU mengeluarkan fatwa untuk berperang atau jihad melawan itu.

⁴⁵ Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarawan Tebuireng, *Resolusi Jihad, Perjuangan Ulama dari Menegakkan Agama dan Negara* (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), p.136.